

BAB I

PENDAHULUAN

Penjajahan Jepang terhadap Korea Selatan yang mulai berlangsung pada masa akhir Kerajaan Chosun telah berhasil menghancurkan kerajaan dan juga rakyat Korea. Masa penjajahan yang berlangsung selama 35 tahun antara tahun 1910-1945 telah banyak menimbulkan luka sejarah bagi bangsa Korea (Yang & Mas'ood, 2003).

Setelah berakhirnya perang dan Korea Selatan berhasil merdeka dari penjajahan Jepang, salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih terus menghambat hubungan kedua negara adalah terkait dengan isu *jugun ianfu*. *Jugun Ianfu* atau *comfort woman* merupakan sebuah istilah sejarah yang digunakan untuk merujuk pada wanita-wanita yang pada masa perang dipaksa untuk bekerja di rumah bordil sebagai pelayan bagi para tentara Jepang. Mereka biasanya dipaksa untuk memberikan kebutuhan seksual kepada para tentara kekaisaran Jepang di rumah bordil yang juga disebut dengan *comfort stations*. *Comfort stations* sendiri sengaja didirikan oleh militer Jepang di beberapa wilayah pendudukannya antara periode sebelum dan selama Perang Dunia II. Para *jugun ianfu* biasanya adalah wanita atau anak perempuan yang diambil dari seluruh wilayah Asia dan juga Pasifik termasuk wilayah Jepang sendiri, Korea, Taiwan, Cina, Filipina, dan Indonesia (Asia-Pacific Journal Feature, 2015).

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya perang Dunia II, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sangat aktif menyuarakan tuntutan kepada Jepang terkait dengan isu sejarah. Salah satunya berkaitan dengan *jugun ianfu*. Isu *jugun ianfu* atau *comfortwoman* mulai muncul dan mendapatkan perhatian publik dan gerakan perempuan di Korea Selatan sejak tahun 1980an. Namun, tindakan nyata dari diangkatnya isu ini adalah melalui kemunculan salah satu korban ke publik untuk pertama kalinya di Korea Selatan tahun 1991 (Yamashita, 2009, hal. 210). *Jugun Ianfu* atau *comfort woman* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perempuan-perempuan yang menjadi korban perbudakan seks dari tentara kekaisaran Jepang selama masa perang.

Kemunculan salah satu korban ke publik untuk pertama kalinya di tahun 1991 merupakan reaksi atas pernyataan pemerintah Jepang dalam sebuah sesi Diet yang menyatakan bahwa pemerintah Jepang secara tegas membantah adanya keterlibatan negara dan militernya terkait dengan isu *jugun ianfu*. Pernyataan inilah yang kemudian mendapatkan reaksi keras dari publik Korea Selatan dan memancing kemarahan salah satu mantan *jugun ianfu* asal Korea Selatan untuk tampil ke publik dan menyampaikan pengalamannya selama bekerja sebagai *jugun ianfu* Jepang. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memaksa pemerintah Jepang menanggapi masalah tersebut. Kesaksian ini kemudian diterjemahkan, dicatat, dan diterbitkan hingga berhasil memecahkan setengah abad kesunyian dari isu ini (Nozaki, 2005, hal. 3). Di tahun selanjutnya isu tersebut kemudian mulai diserukan ke PBB (Yamashita, 2009).

Sejak kemunculan isu ini untuk pertama kalinya ke publik, kegiatan para aktivis di Korea Selatan terkait dengan isu ini semakin masif. Para korban dan juga aktivis kemudian mendirikan sebuah lembaga yang disebut *Korean Council for the women Drafted for military sexual slavery by Japan*. Lembaga tersebut juga langsung mengkoordinasikan demonstrasi para aktivis dan warga Korea Selatan serta mulai menggerakkan media, sehingga isu ini semakin tersebar luas dan mendapatkan perhatian dunia Internasional. Kegiatan rutin yang mulai dilakukan oleh para aktivis dan warga Korea Selatan yaitu berkumpul di depan Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan setiap hari rabu untuk melakukan demonstrasi terkait tuntutan mereka terhadap isu ini. Demonstrasi tersebut kemudian disebut dengan *wednesday demonstration*. *Wednesday demonstration* sendiri pertama kali dilakukan di bulan januari 1992 dan terus dilakukan secara rutin hingga 25 tahun terakhir yang kemudian mencapai sekitar 1.300 kali dan dicatat sebagai demonstrasi terpanjang di dunia (Bemma, 2017).

Pada bulan juli tahun 1995, pemerintah Jepang sempat mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan *Asian Women's Fund* yang digunakan sebagai media untuk memberikan bantuan medis dan juga bantuan keuangan kepada para korban *jugun ianfu*. Pemerintah juga membuat surat permintaan maaf kepada para korban yang ditanda tangani oleh Perdana Menteri dan juga Direktur *Asian Women's Fund* sebagai upaya penyelesaian terkait isu ini. Tetapi upaya pertanggung jawaban dari pemerintah Jepang melalui *Asian Women's Fund* dan juga melalui surat ini tidak mendapatkan sambutan baik dari pemerintah Korea Selatan maupun dari para korban dan juga para aktivis. Pemerintah Korea Selatan dan para korban serta aktivis justru mengkritik tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah Jepang dan tetap menuntut adanya penyelesaian dan kompensasi secara hukum dan juga moral terkait isu ini. Hal inilah yang kemudian membuat *Asian Women's Fund* akhirnya ditutup pada tahun 2007 tanpa pencapaian yang signifikan (Yamashita, 2009).

Pada periode sebelumnya, permintaan maaf terkait isu *jugun ianfu* juga pernah disampaikan oleh Kepala Sekretaris Kabinet Yohei Kono dan juga Perdana Menteri Tomiichi Murayama. Pernyataan ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Kono Statement* dan *Murayama Statement*. Kepala Sekretaris Kabinet Yohei Kono bahkan menyampaikan sebuah pernyataan resmi sebagai hasil dari analisis terkait dengan isu ini. Pernyataan ini secara singkat berisi tentang pengakuan keterlibatan militer Jepang dalam mendirikan dan mengorganisir sistem *jugun ianfu*. Selain itu, pernyataan ini juga berisi permohonan maaf dan penyesalan yang teramat dalam kepada semua korban *jugun ianfu* Jepang terutama yang berasal dari Korea Selatan karena telah mengalami luka fisik maupun psikologis (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1993). Namun, pernyataan ini pun masih dianggap belum cukup bagi para korban dan aktivis serta pemerintah Korea Selatan untuk melepaskan Jepang dari tanggung jawabnya.

Pada tahun 2011 para aktivis Korea Selatan dengan dukungan dan juga izin pemerintah kemudian membuat sebuah patung *jugun ianfu* atau monumen perdamaian. Keberadaan patung tersebut merupakan salah satu upaya untuk terus mengingatkan keberadaan para *jugun ianfu* dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Jepang berkaitan dengan isu ini. Patung *jugun Ianfu* salah satunya diletakkan tepat di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul dan merupakan gambaran serta simbol dari para korban *jugun ianfu*

Jepang selama periode sebelum dan selama Perang Dunia II. (sol & Griffiths, 2017).

Selain tuntutan yang berasal dari para korban, aktivis, serta simpatisan terkait isu *jugun ianfu*, pemerintah Korea Selatan pun terus berupaya melakukan tindakan pengangkatan terkait isu ini menjadi salah satu isu diplomatik yang sangat penting bagi hubungan kedua negara. Hal ini ditunjukkan oleh Presiden Korea Selatan ke 10 yaitu Lee Myung-bak yang pada saat itu menyampaikan pidatonya pada peringatan 67 tahun berakhirnya kolonialisme Jepang dalam Perang Dunia II di tahun 2012. Beliau mengingatkan kepada Pemerintah Jepang atas tanggung jawab yang harus segera dilakukan terkait para korban *jugun ianfu* Jepang. Presiden Lee Myung-bak juga menegaskan bahwa tindakan militer Jepang pada saat perang bukan hanya melanggar hak-hak perempuan tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara umum yang harus segera dipertanggung jawabkan (Tempo. co, 2012).

Presiden Korea Selatan periode selanjutnya yang mulai dilantik pada tanggal 25 Februari 2013 Park Geun-hye juga secara tegas menolak untuk bertemu dengan Perdana Menteri Shinzo Abe. Sikap keras yang ditunjukkan oleh Presiden Park juga mengindikasikan bahwa akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi kedua negara untuk bisa mencapai penyelesaian dan kompromi terkait dengan isu tersebut. Hal ini tentu sangat berdampak bagi hubungan diplomatik antara kedua negara, karena pemerintah Korea Selatan tidak segan mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik antar kedua negara yang kemudian bisa memicu meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Timur.

Namun, kedua negara tersebut justru mengejutkan banyak pihak ketika keduanya secara tiba-tiba mengumumkan telah menyelesaikan isu eksploitasi seksual tentara kekaisaran Jepang pada saat Perang terhadap wanita Korea atau *jugun ianfu* pada bulan Desember tahun 2015. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se dan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida (Benjamin, 2016). Kesepakatan tersebut berisi 3 poin utama. Pertama, Pemerintah Jepang bersedia secara tulus untuk meminta maaf atas tindakan selama masa perang terutama berkaitan dengan isu *jugun ianfu*. Kedua, Jepang juga akan menyumbang sebesar 1 miliar yen (sekitar \$ 8,9 juta) sebagai wujud kompensasi terhadap para korban selamat atau keluarga mereka melalui sebuah yayasan yang akan didirikan di bawah pemerintah Korea Selatan. Ketiga, Korea Selatan akan berusaha menyelesaikan masalah terkait pendirian patung *jugun ianfu* di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul (Joseph, 2017).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang muncul adalah mengapa Pemerintah Korea Selatan bersedia menyelesaikan isu *jugun ianfu* dengan Jepang melalui *Agreement On Comfort Woman* pada tahun 2015?

C. Kerangka Teoretik

Dalam menganalisis pokok permasalahan yang ada, penulis menggunakan pokok pemikiran berupa teori atau konsep yang sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas. Namun, sebelum dijelaskan mengenai teori atau konsep yang digunakan

untuk menganalisa permasalahan, terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang disebut sebagai teori dan konsep.

Teori secara umum adalah penjelasan yang mampu menjawab pertanyaan mengapa sesuatu bisa terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Selain itu, teori bukan hanya digunakan untuk eksplanasi melainkan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat suatu prediksi. Dari asal katanya sendiri teori berarti melihat atau memperhatikan, dengan itu dapat dikatakan bahwa teori merupakan suatu pandangan atau persepsi tentang sebuah peristiwa yang terjadi (Mas'oed, 1990, hal. 185). Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu (Mas'oed, 1990, hal. 94)

1. Teori Peran Dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri

Teori peran dalam analisis Kebijakan Luar Negeri salah satunya dikemukakan oleh Marijke Breuning dalam bukunya yang berjudul *Foreign Policy Analysis A Comparative Introduction*. Menurut Breuning Kebijakan Luar Negeri suatu negara sebenarnya merupakan cerminan dari pemikiran para pemimpinnya. Pemimpin suatu negara dalam mengambil keputusan biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk emosi dan juga sudut pandang, latar belakang, bahkan para pengambil kebijakan lain yang berada disekitar pemimpin tersebut. Dalam teori ini yang menjadi fokus utama level analisisnya adalah individu atau pemimpin sebagai pembuat kebijakan. Menurut Breuning Tingkat analisis individu berfokus pada pemimpin atau para pengambil kebijakan dalam upaya untuk menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara diambil. Teori ini berasumsi bahwa individu dalam hal ini pemimpin negaralah yang akan

membentuk sejarah, karena terjadinya suatu peristiwa penting akan sangat bergantung pada pilihan dan juga tindakan yang mereka lakukan (Breuning, 2007).

Studi para pemimpin sering meminjam konsep dari ilmu psikologi yang telah menemukan banyak instrumen dalam mempelajari individu dan motivasi mereka, pendekatan mereka terhadap pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta pandangan dasar mereka tentang dunia di sekitarnya. Level analisis individu juga berfokus pada kepribadian dan juga persepsi individu dari para pembuat kebijakan, termasuk bagaimana cara pandang dan pemahaman mereka terhadap suatu hal atau peristiwa tertentu. Salah satu fokus mengacu pada studi tentang kepribadian, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut untuk menjelaskan bagaimana keputusan kebijakan luar negeri tersebut diambil (Breuning, 2007, hal. 11-12). Walaupun seorang pemimpin memiliki hak untuk memutuskan kebijakan apa yang akan dipilih, pemimpin negara sangat jarang untuk membuat kebijakannya seorang diri. Mereka biasanya sangat dipengaruhi oleh para pembuat kebijakan lain termasuk penasehat dan juga sistem birokrasi yang memainkan peran tertentu dalam pemerintahannya (Breuning, 2007, hal. 9). Para pemimpin biasanya diasumsikan menggunakan pilihan rasional dan mempertimbangkan apa yang hal yang paling mendesak yang harus dipenuhi bagi negara dalam mengambil setiap keputusannya. Dalam kasus seperti itu, kepribadian dan persepsi individual mereka akan berinteraksi dalam menentukan cara terbaik untuk menentukan masalah dan juga kebijakan yang akan diambil.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya keputusan dari pemerintah Korea Selatan yang bersedia untuk mempercepat penyelesaian masalah isu *jugun ianfu* dengan Jepang juga tidak terlepas dari peran individu atau pemimpin selaku

penentu kebijakan dalam hal ini adalah presiden Park Geun-hye. Namun, dalam menentukan keputusannya tersebut Park tidak sendiri melainkan juga atas bantuan para pembuat kebijakan lain disekitarnya. Dengan kepribadiannya yang cenderung untuk mempertimbangkan suatu kebijakan hanya dengan memilih alternatif tertentu, Presiden Park memutuskan untuk mengutus Kepala staf kepresidenannya sebagai representatif yang mewakili negaranya untuk melakukan negosiasi rahasia bersama dengan pihak Jepang. Selain itu juga dipengaruhi oleh cara pandang dan latar belakang Park Geun-hye tentang kekhawatirannya akan keamanan negaranya dan juga pencegahan terhadap provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara.

Korea Selatan sendiri merupakan negara yang beberapa periode kepemimpinannya masalah keamanan nasional masih menjadi prioritas utama. Hal itu disebabkan oleh latar belakang dan juga sejarah Korea Selatan yang didasarkan pada pemisahan bangsa Korea oleh sekutu dan Perang Korea (1950-1953) yang pernah menghancurkan semua fasilitas industri dan mengorbankan jutaan jiwa. Ketakutan akan adanya serangan dari luar, khususnya meningkatnya ancaman dari Korea Utara menyebabkan pemerintah masih menekankan pentingnya masalah keamanan nasional dan sering menggunakan isu tersebut dalam kampanye pemilu dan sebagainya. Hal ini juga masih berlaku bagi Presiden Park (Yang & Mas'ood, 2003, hal. 9). Sejak pelantikannya, salah satu yang menjadi pusat bagi kebijakan Presiden Park Geun-hye adalah Korea Utara. Uji coba nuklir ketiga Korea Utara, yang dilakukan selama masa transisi di Korea Selatan merupakan tantangan pertama bagi pemerintahan Presiden Park (Tatar, 2013). Salah satu cara yang ditempuh oleh Presiden Park untuk menguatkan pertahanan dan keamanan negaranya adalah dengan memperkuat

aliansinya bersama negara-negara sekutu termasuk Amerika Serikat dan Jepang. Menyadari hubungan yang tidak harmonis dengan Jepang, langkah yang ditempuh untuk menguatkan dan memaksimalkan kerjasama keamanan adalah memperbaiki hubungan antara kedua negara dengan menyelesaikan permasalahan antara Korea Selatan dan Jepang yaitu berkaitan dengan masalah sejarah. Selain itu, Presiden Park sejak awal masa jabatannya juga sudah memiliki niat untuk menyelesaikan isu ini, sehingga ia terus mencari cara agar masalah ini bisa terselesaikan dan bisa diterima oleh semua pihak.

2. Sistem Politik

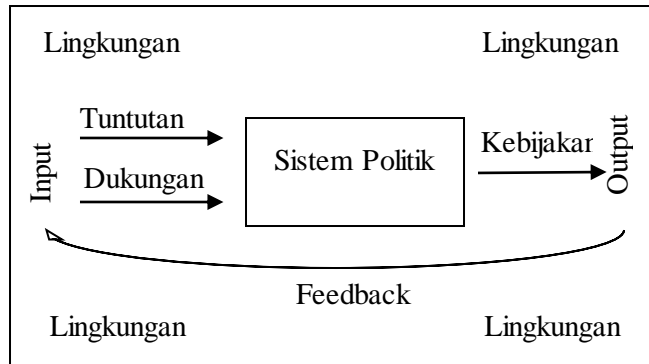
Teori sistem politik dikenal dengan pendekatan tingkah laku oleh karena mengemukakan tingkah laku politik sebagai fokus utama dari penelitian dan terutama menekankan struktur dan fungsi tingkah laku. Suatu sistem politik juga diibaratkan seperti halnya organisme dalam ilmu biologi, di mana mereka terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung pada bagian lainnya dan juga saling mengadakan interaksi (Budiardjo, 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan sebuah sistem yang berisi tentang keseluruhan proses dalam menentukan pilihan mana yang bisa diambil untuk menciptakan kekuatan maksimal dengan cara melibatkan aktor lain dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis di dalamnya.

Dalam teori sistem politik ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh David Easton. David Easton sendiri mengemukakan pendapatnya terkait sistem politik dalam artikelnya yang dimuat oleh *World Politics Journal* yang berjudul *An Approach to the Analysis of Political Systems*. Ia menyatakan bahwa terdapat beberapa aktor yang mungkin berpengaruh dalam sistem politik diantaranya

adalah partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah dan melalui sistem voting.

Sistem politik memiliki sifat tertentu karena mereka adalah sebuah sistem. Menurut Easton terdapat beberapa elemen penting yang memengaruhi para pengambil keputusan dalam sistem politik. Selain itu, dalam sistem politik faktor yang sangat berpengaruh adalah lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada diagram di bawah ini :

Gambar 1.1 Diagram Sistem Politik David Easton



Sumber : Sistem Politik David Easton (Easton, 1957)

Pada diagram di atas dapat kita lihat bahwa yang menjadi faktor utama dalam memengaruhi sistem politik adalah lingkungan. Lingkungan sendiri kemudian bisa menghasilkan input dan output. Input yang masuk kemudian dikonversi oleh proses yang ada di dalam sistem sehingga menghasilkan output yang nantinya akan berdampak baik bagi sistem maupun lingkungan dimana sistem tersebut berada. Selain terdapat input dan output, lingkungan juga mampu memberikan *feedback* atau umpan balik baik yang berasal dari dalam sistem politik itu sendiri ataupun

dari lingkungan setelah adanya hasil keputusan atau kebijakan (Easton, 2012).

Input memiliki 2 bentuk yaitu tuntutan dan dukungan, hal inilah yang kemudian membuat sistem politik memiliki karakter yang dinamis. Input berupa tuntutan biasanya dilakukan oleh orang-orang atau pun kelompok tertentu yang tidak sepenuhnya puas dengan suatu keadaan. Di mana bentuk dari tuntutan ini biasanya sifatnya beragam dan juga memiliki dampak yang juga berbeda pada setiap tuntutan atas sistem politik. Dalam sistem politik, input berupa tuntutan belum cukup untuk terus menjamin berjalannya sistem tersebut. Karena input berupa tuntutan tersebut hanyalah merupakan bahan mentah guna menghasilkan sebuah produk yang disebut dengan kebijakan. Energi dalam bentuk tindakan atau orientasi yang lebih mempromosikan atau melawan sistem politik, sehingga keputusan yang dikeluarkan harus diletakkan di dalam sistem untuk membuatnya terus berjalan. Itulah yang disebut dengan dukungan. Dukungan ini juga biasanya berupa upaya mempertahankan ataupun menolak suatu sistem yang ada. Tanpa adanya dukungan, sebuah tuntutan akan sulit untuk mencapai tujuan dengan maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, sama halnya dengan keputusan dari pemerintah Korea Selatan yang memutuskan untuk mempercepat penyelesaian isu *jugun ianfu* melalui penandatanganan kesepakatan *Agreement On Comfort Woman* atau perjanjian "*final and irreversible*" pada tahun 2015 yang dipengaruhi adanya input berupa tuntutan dan juga dukungan yang berasal lingkungan baik domestik maupun Internasional, sehingga kemudian berpengaruh pada diambalnya keputusan tersebut.

a. Tuntutan

Isu *jugun ianfu* menjadi salah satu permasalahan yang sudah cukup lama menarik perhatian publik Korea Selatan maupun dunia Internasional. Hal ini disebabkan oleh rumitnya penyelesaian dan juga negosiasi yang terjadi dengan pemerintah Jepang selaku pihak yang dianggap harus bertanggung jawab atas isu tersebut. Tuntutan dari dalam negerinya untuk segera melakukan penyelesaian terkait dengan isu tersebut dikeluarkan oleh salah satu instansi penting pemerintah di Korea Selatan yakni Mahkamah Konstitusi. Tuntutan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada pemerintah Korea Selatan sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara yang dilanggar sebagai akibat dari kelambanan dan juga kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan isu tersebut.

b. Dukungan

Selain adanya tuntutan dari lingkup domestik berupa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusinya, pemerintah Korea Selatan juga mendapatkan dukungan dari pihak Internasional terutama dari pihak Amerika Serikat untuk segera mempercepat negosiasi dan juga pengambilan tindakan tegas bersama dengan pemerintah Jepang terkait penyelesaian masalah ini. Hal ini dilakukan agar hubungan buruk antar kedua negara tidak semakin mengganggu kerjasama yang dilakukan oleh ketiga negara. Ketika kedua pemimpin negara menunjukkan keengganannya untuk bertemu satu sama lain karena adanya perbedaan interpretasi sejarah, pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden Obama memulai langkah awal dengan menjadi pihak ketiga selaku penengah bagi kedua belah pihak dalam mendukung penyelesaian terkait isu tersebut (Panneerselvam &

Puthanveedu, 2016). Hal itu salah satunya diwujudkan dengan cara menginisiasi dilakukannya pertemuan yang melibatkan kedua pemimpin negara disela-sela Konferensi Keamanan Nuklir di Den Haag Belanda.

D. Hipotesa

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dan juga didukung oleh latar belakang dan kerangka teoretik yang telah ditetapkan, maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa selesainya penandatanganan perjanjian *jugun ianfu* antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2015 disebabkan oleh :

1. Cara pandang Presiden Park Geun-hye
2. Adanya tuntutan dari lingkup domestik terutama dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan
3. Adanya dukungan dari pihak Internasional yaitu Amerika Serikat

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemerintah Korea Selatan sehingga bersedia menyelesaikan isu *jugun ianfu* bersama dengan Jepang melalui *Agreement On Comfort Woman* pada tahun 2015.
2. Untuk mengaplikasikan berbagai macam sisi teoritis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam sebuah isu Internasional.

F. Metode Penelitian

Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yaitu studi literatur. Data yang digunakan juga merupakan data yang bersifat kualitatif seperti dokumen-dokumen yang diperoleh melalui sumber informasi yang relevan seperti buku,

jurnal, majalah, surat kabar baik yang cetak maupun yang bersifat elektronik, dan sumber data di internet yang sangat mendukung dan terkait dengan isu yang dibahas. Sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian diamati dan dianalisis agar dapat mendukung penelitian dan juga argumen yang disampaikan.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian digunakan penulis untuk lebih memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan. Peneliti memulai pencarian data pada rentang waktu di tahun 2011 hingga kemudian Presiden Park Geun Hye terpilih dan mulai menjabat sebagai presiden Korea Selatan sampai dengan tahun 2015 setelah diambilnya keputusan dari pemerintah Korea Selatan yang mempercepat penyelesaian isu *jugun ianfu* bersama dengan pemerintah Jepang melalui *Agreement on Comfort Women* atau perjanjian *final and irreversible*.

Selain itu apabila ada pembahasan masalah-masalah yang ada diluar jangkauan waktu yang ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansinya akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan historis serta untuk menjelaskan uraian yang dimaksud.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Bab ini berupa Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teoretik, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini akan menjelaskan tentang dinamika isu *jugun ianfu* dalam hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang

- Bab III** : Bab ini akan menjelaskan tentang kesepakatan dalam perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang terkait isu *jugun ianfu*, serta proses awal hingga tercapainya perjanjian tersebut.
- Bab IV** : Bab ini akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemerintah Korea Selatan sehingga bersedia menyelesaikan isu *jugun ianfu* dengan Jepang melalui *Agreement On Comfort Woman* pada tahun 2015
- Bab V** : Bab ini akan memberikan kesimpulan dan rangkuman dari argumen yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.